



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOB ARTHUR LOMBOGIA**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR**
3. NHK : **628854**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.345.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah Seluas 2154 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 150.000.000		
4. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
5. Tanah Seluas 9200 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
6. Tanah Seluas 9000 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	147.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.200.145.313



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 2.872.645.313

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.872.645.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.